

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

1. Pengertian Keuangan

Keuangan diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dalam mengelola uang. Setiap individu dan organisasi akan memperoleh dan menghabiskan uang atau menginvestasikan uang. Keuangan berkaitan dengan proses, institusi, pasar, dan instrumen-instrumen yang terlibat dalam pengiriman uang antar individu, bisnis dan pemerintah.¹⁶

Dari pengertian di atas keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dalam pengelolaan keuangan yang meliputi proses penerimaan dan pengeluaran uang yang baik itu antar individu maupun organisasi.

2. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat

¹⁶Agustina Saputri, *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), h. 86

kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah (MBS), menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawaban pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah.¹⁷

Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan *input* dan proses untuk menghasilkan *output* berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan
- b. Orangtua atau peserta didik
- c. Masyarakat.

Menurut undang-undang menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah

¹⁷M Dzulfikar Abid, *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMANegeri Se-Kabupaten Kendal*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 32

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁸

Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat. Anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten. Dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.¹⁹

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelolaan

¹⁸TP, *Sistem Pendidikan Nasional*, Undang Republik Indonesia Nomor 20, 2003

¹⁹TP, *Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48, 2008

keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen.²⁰ Manajemen anggaran atau biaya sekolah merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah.²¹

Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan.²²

Pengelolaan keuangan sekolah adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama dalam pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung

²⁰Rajdan Mestry dan Tom Bissch, *Financial School Management Explained*, Cape Town: Pearson Education South Africa, 2009), h. 65

²¹Sutomo, *Manajemen Sekolah*, (Semarang: UPT Unnes Press, 2011), h. 76

²²Bafadal Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), h. 97

jawab dalam suatu bidang dan mendefinisikan manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan tersebut.

Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi:

a. Perencanaan anggaran

Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan

alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dan untuk setiap komponen.²³

Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, ada tiga cara sudut pandang, yaitu:

- 1) *Comparative approach*, penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran untuk setiap tahun.
- 2) *The Planning Programming Budgeting Evaluation System* (PPBES) penganggaran yang berorientasi pada perencanaan sasaran penilain PPBES didasarkan pada *zero-based budgeting*.
- 3) *Functional Approach*, penganggaran dalam bentuk gabungan antara PPBES dan *comparative approach*.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan

²³ Daud Jaleluddin, *Prosedur Perencanaan*, (Universitas Sumatera Utara: Jurnal-USU Repository, 2004), h. 72

sekolah adalah penentuan tujuan yang hendak dicapai beserta penggunaan sumber daya dengan memperhatikan keadaan di masa depan.

b. Pencatatan Keuangan sekolah

Pencatatan keuangan sekolah atau yang lebih dikenal dengan penyelenggaraan akuntansi pendidikan bertujuan untuk menyediakan gambaran keuangan pada keseluruhan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari empat laporan yaitu :²⁴

- 1) Laporan neraca yang berisikan data tentang aset, utang, dan modal.
- 2) Laporan surplus defisit yang berisikan data tentang pendapatan, biaya, surplus atau deficit.
- 3) Laporan arus kas yang berisikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan
- 4) Catatan atas laporan keuangan.

Sekolah juga memerlukan suatu sistem akuntansi yang disesuaikan dengan entitas pendidikan dalam rangka menyediakan gambaran keuangan sekolah. Gambaran keuangan yang berupa

²⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga,2006), hal.90.

laporan keuangan sekolah perlu untuk dianalisis sebagai cara dalam membaca laporan keuangan sekolah.

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, diantaranya:

- a. Penerimaan
- b. Penggunaan
- c. Pertanggungjawaban

Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui:

- a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- c. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- d. Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di alokasikan

minimal 20% dari APBN dan APBD.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah merupakan keseluruhan aktivitas dalam mengatur keuangan sekolah dengan menerima dan membelanjakannya yang direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya guna menjalankan pelayanan pendidikan.

3. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian,

²⁵Bafadal Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 56

sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jendral Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

4. Sumber-Sumber Keuangan Sekolah

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumberlain.

Sumber keuangan sekolah dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, tingkat Provinsi, dan pemerintah daerah. Seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dan dana bantuan operasional (BOP). Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Jadi sumber pembiayaan yang dari pemerintah pusat masih umum bisa berupa uang, sarana, buku dan lain-lain.

- b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali siswa

Dana yang dikumpulkan dari pengurus BP3 atau komite sekolah dari orang tua siswa. Sumber pendanaan pendidikan Islam tidak terlepas dari kontribusi orang tua siswa, ini kemungkinan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah.

- c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa

Sumber pendanaan tidak terlepas dari sumbangsih masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, kelompok masyarakat ini juga merupakan sumber yang penting dalam hal pendanaan lembaga pendidikan Islam. Tugas kelompok masyarakat ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari pada tokohnya di masyarakat, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan sebagainya. Indonesia terdapat banyak lembaga pendidikan baik itu yang negeri maupun swasta yang dibangun dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Adapun biasanya masyarakat menggalang pendanaan untuk lembaga pendidikan dalam hal:

- 1) Dalam hal pengembangan sekolah
- 2) Berpartisipasi dalam hal membangun lembaga pendidikan.
- 3) Mencari donatur dan dermawan baik mengikat maupun tidak mengikat.²⁶

Kuangan pendidikan sangatlah penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen penting lainnya. Sehingga sekolah diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, agar menghasilkan lulusan yang bermutu. Hal ini tentu tidak terlepas dari sumber-sumber keuangan yang potensial yang dapat membantu keberlangsungan pengelolaan tersebut, dikarenakan sekolah tidak dapat hanya mengandalkan sumber keuangan dari satu sumber saja.

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

²⁶Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 93

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²⁷

Transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.

2. Tujuan Transparansi

²⁷ Viktoria Tomi, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*, (Yogyakarta : UNY, 2014)

Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.²⁸

3. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti (2011,224),Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptaakn kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.²⁹

Manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

4. Indikator Tercapainya Transparansi

Adapun indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

²⁸ Novie, *Tujuan Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan*, (2017).

²⁹ Minarti, Sri, *Manajemen Berbasis Sekolah : Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media

- b. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.³⁰

C. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka pihak sekolah perlu mempertanggungjawabkan pemakaian sumber dana yang telah dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³¹

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (*accountability*) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggungjawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka

³⁰ Viktoria Tomi, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*, (Yogyakarta : UNY, 2014

³¹ Shaftratunnisa, Fierda. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakhir* (2015).

mengenai keputusan- keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif.³²

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

2. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung

³² <https://amiamalihanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan>

jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada *public*.³³

Tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

3. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Mendorong terciptanya transparansi organisasi.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

³³ Viktoria Tomi, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*, (Yogyakarta :UNY, 2014)

Dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

4. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Adapun indikator akuntabilitas yaitu:

- a. Adanya bukti fisik dalam penggunaan anggaran
- b. Adanya pencatatan anggaran sesuai dengan pedoman (petunjuk teknis)
- c. Adanya kegiatan pelaporan setiap penggunaan keuangan³⁴

D. Kerangka Konseptual

Laporan keuangan sekolah penting untuk dianalisis karena dapat diketahui kelebihan dan kekurangan keuangan sekolah. Peneliti fokus dengan dua prinsip yaitu, transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

³⁴ Viktoria Tomi, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*, (Yogyakarta : UNY, 2014

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan keuangan Sekolah pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional. Dengan demikian pengelolaan keuangan Sekolah akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada.